



**KEKERASAN SOSIAL
DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA
Suatu Pendekatan Sosial Budaya**

PIDATO PENGUKUHAN

Disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru
Besar dalam Ilmu Antropologi Budaya pada Fakultas
Sastra Universitas Diponegoro
Semarang

12 Januari 2008

Oleh :

MUDJAHIRIN THOHIR

**KEKERASAN SOSIAL
DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA
Suatu Pendekatan Sosial Budaya**

MUDJAHIRIN THOHIR

PIDATO PENGUKUHAN

Diucapkan pada Upacara
Penerimaan Jabatan Guru Besar Ilmu Antropologi Budaya
pada Fakultas Sastra Universitas Diponegoro

Semarang, 12 Januari 2008

Cetakan pertama, 2008

Diterbitkan oleh Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang

ISBN: 978.979.764.586.9

Yang saya hormati:

Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro,

Sekretaris Senat Universitas Diponegoro,

Ketua dan Anggota Dewan Penyantun Universitas Diponegoro,

Gubernur Jawa Tengah,

Para Pejabat Sipil dan Militer,

**Para Anggota Senat dan Dewan Guru Besar Universitas
Diponegoro,**

Para Guru Besar dari luar Universitas Diponegoro,

Para Pembantu Rektor Universitas Diponegoro,

**Para Dekan, Pembantu Dekan, Direktur, Ketua, dan Sekretaris
Lembaga di Universitas Diponegoro,**

**Para Ketua, Sekretaris Jurusan, dan Dosen Universitas
Diponegoro,**

**Para Mahasiswa, para Staf Administrasi dan Karyawan
Universitas Diponegoro,**

**Dan yang tidak kalah pentingnya untuk saya hormati dan
muliaikan, yaitu para Tokoh Agama, Kaum Budayawan, para
Seniman, para Wartawan,**

para penggiat kedamaian di muka bumi, rekan, sahabat, keluarga,
dan para hadirin semua,

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WA
BARAKATUH

Bismillah.

Perkenankanlah saya, sebelum memulai menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai guru besar pada ilmu budaya di Undip ini, untuk menyampaikan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada hamba yang fakir ini. Sholawat dan salam saya kepada Rasul yang amat dicintai-Nya, yang karena itu pula Sang Rasul tidak menyia-nyiakan cinta-Nya untuk mencintai umatnya melebihi dirinya sendiri. Dari sini pula sesungguhnya kecintaan saya kepada Sang Rasul terukur, yaitu apakah saya masih bisa mencintai sesama manusia, termasuk mencintai makhluk-makhluk ciptaan-Nya. Semoga Allah senantiasa membukakan hatinurani kita sehingga kita berkemampuan untuk mencintai-MU ya Allah dan mencintai semua ciptaan-Mu.

Terima kasih kepada Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro, yang telah memberikan kesempatan kepada saya, untuk menyampaikan pidato pengukuhan atas penerimaan jabatan “guru besar” (dengan “b” kecil), dalam bidang ilmu “Antropologi Budaya” pada Fakultas Sastra Universitas Diponegoro ini.

Hadirin semua yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan penghargaan yang tulus atas kehadiran para hadirin, atas berkenan memenuhi undangan pengukuhan ini. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan berjudul: **KEKERASAN SOSIAL DI INDONESIA – SUATU PENDEKATAN SOSIAL BUDAYA.**

Pilihan atas judul dimaksud, di samping karena dengan mata kepala sendiri kita mengamati, setiap hari, setiap waktu, dan setiap tempat, ada tindak kekerasan, baik yang disengaja atau tidak disengaja, yang terjadi dalam lingkup antarpribadi, antarkelompok, antarbangsa, yang muncul karena kesalahpahaman, buruk-sangka, kebencian, dan dendam, yang dimotivasi oleh pengutamaan kepentingan politik, ekonomi, budaya, bahkan agama.

Jika keseluruhan dari tindak kekerasan dimaksud bermula dari pikiran dan perasaan, maka dengan pemilihan judul dimaksud, juga dimaksudkan untuk melakukan perenungan bersama. "jika kekerasan bermula dari pemikiran, mengapa pemikiran itu tidak diarahkan kepada kedamaian. Dengan mengarahkan pikiran dan perasaan kepada kedamaian, bukankah setiap ketegangan dan konflik selalu ada jalan keluarnya? Inilah kunci dari cara kita mencintai Allah dengan cara mencintai ciptaan-Nya.

KEKERASAN SOSIAL DI INDONESIA

Suatu Pendekatan Sosial Budaya

I. Pendahuluan

Manusia dari segi *nurture*, lahir (*by given*) telah memiliki ciri-ciri bawaan sendiri secara berbeda, seperti bentuk tubuh, kromosom, warna kulit, dsb. Dari segi *culture*, manusia hidup dan dibesarkan juga dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang berbeda. Pengaruh keduanya, menjadikan manusia pada batas-batas tertentu memiliki kemiripan, kesamaan, atau perbedaan. Perbedaan-perbedaan seperti inilah yang dalam sejarah kehidupan mulai dikenal istilah kemajemukan. Hadirnya entitas kemajemukan dalam satu segi, dan pemilahan diri secara biner dalam segi yang lain, menghadirkan dua sisi dari sebuah mata uang, yaitu permusuhan dan persaudaraan.

Permusuhan terjadi sebagai akibat dari cara melihat diri (*the self*) terhadap sosok orang lain (*the others*) yang berbeda itu sebagai pihak yang di luar, yang berpeluang untuk

mengancam, baik oleh atau atas nama perbedaan *nurture* maupun *culture*. Perbedaan-perbedaan itu pada gilirannya, ditempatkan dan diposisikan sebagai pihak-pihak yang bisa mempersempit peluang, atau memperlemah keyakinan keagamaan. Inilah fenomena di balik kemajemukan.

Ketika melihat Indonesia sebagai satuan kewilayahan sosial, ditemukan keanekaragaman atau kemajemukan fisikal dan kultural. Kemajemukan ketubuhan seperti warna kulit, kemajemukan kultural seperti kemajemukan etnis, agama, golongan sosial dan kepentingan. Sebagai suatu kemajemukan, maka di dalam banyak wilayah geografis dan kultural Indonesia, di sana didapatkan orang-orang yang berasal dari etnis yang berbeda-beda. Perbedaan etnis itu bisa juga diikuti oleh perbedaan agama, perbedaan golongan, dan perbedaan status sosial. Semakin besar wilayah kehidupan masyarakat manusia, semakin kompleks kemajemukannya. Di desa-desa terpencil, mungkin hanya ada satu atau dua warga yang berbeda etnik atau berbeda agama. Pada tingkat kecamatan dan kabupaten, perbedaan itu semakin kentara. Apalagi pada wilayah provinsi, kita menjadi sulit menghitung secara pasti, berapa jumlah orang

dilahirkan dari segi perbedaan etnik, agama, golongan dan sebagainya yang hidup dan menjadi warga kota. Begitu pula di kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Pendek kata, kemajemukan adalah suatu kondisi yang alami.

Kemajemukan sebagai kondisi yang alami itu, melahirkan pengaruh-pengaruh yang berbeda-beda pula. Pengaruh kemajemukan dari satu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya¹. Ada kalanya di dalam kemajemukan itu – untuk wilayah-wilayah tertentu ditemukan konflik-konflik yang terbuka, tetapi pada wilayah-wilayah lain konflik tidak muncul secara terbuka (laten)².

¹ Dari semula bangsa Indonesia telah mengenal dirinya sebagai bangsa yang berciri khas majemuk (beragam). Keragaman yang berganda. Mitos bahwa keragaman yang berganda merupakan sumber konflik atau disintegrasi kesatuan bangsa mempunyai alasan tersendiri. Pertanyaan penting yang selalu mengusik kita adalah bagaimana memadu keragaman yang berganda itu menjadi kekuatan pembangunan yang ampuh (lihat pula Fobia, 1994: 83).

² Etnisitas setiap etnik bisa menumbuhkan suatu ketahanan, solidaritas, kohesivitas intraetnik yang luar biasa yang mengakibatkan terbentuknya prasangka sosial terhadap etnik lain. Etnisitas itu dapat berwujud sikap dari para komunikator setiap etnik yang : 1) kurang terbuka; (2) kurang empati; (3) selalu berfikir negatif; (4) kurang mendukung; dan (5) kurang memelihara keseimbangan dengan para komunikator dari etnik lain. Keadaan demikian, dalam pergaulan setiap hari, ditandai oleh cara berfikir, berperasaan, bertindak lebih mengutamakan intraetnik daripada etnik lain. Masalah-masalah tersebut dapat muncul diduga merupakan akibat dari

pengaruh prasangka sosial yang berwujud stereotip, jarak sosial, dan sikap diskriminasi terhadap etnik lain (lihat pula Liliweri, 1994: 3-4).

Dalam konteks seperti itu, kemajemukan dan konflik, adalah dua istilah yang bisa berdiri sendiri, tetapi bisa saling terkait. Bisa berdiri sendiri karena dalam kemajemukan, belum tentu ada konflik. Atau jika ada konflik, maka konflik itu muncul tidak selalu didasari oleh faktor kemajemukan. Bisa saling terkait kalau kemunculan konflik dilatarbelakangi oleh adanya kemajemukan. Ini artinya, konflik bisa muncul dari internal kelompok yang tunggal, tetapi bisa muncul dari kelompok atau golongan yang majemuk atau anekaragam. Pada umumnya, konflik memang sering dilatarbelakangi oleh kemajemukan. Jika bukan karena kemajemukan etnik, agama, atau golongan, setidaknya-tidaknya adalah kemajemukan pemikiran, pandangan, dan kemauan, atau kepentingan. Di sini lalu, kemajemukan memberi ruang kepada perbedaan.

Dalam kehidupan sosial, kemajemukan tidak saja terbatas pada entitas tetapi juga dinamika dan akibat dari kinerja. Di sinilah lalu masyarakat manusia bukan saja berkecenderungan untuk dalam satu sisi mengelompokkan diri dalam satuan-satuan sosialnya, sesuai dengan kesamaan-

kesamaan asal-usul, kedaerahan, etnik, keagamaan, profesi, intensi dan kepentingan, tetapi bersamaan dengan itu juga hadir dan menghadirkan kelompok lain yang tidak sama, sebagai kelompok yang berada di luarnya. Mulai dari sini dikenal adanya "in-group" lawan "out-group". Kecenderungan demikian inilah yang menghadirkan dalam sejarah kehidupan masyarakat manusia itu kedua sisi dalam suatu mata uang, yaitu konflik dan harmoni.

2. Konflik Sosial

Gejala dari lahirnya apa yang disebut konflik adalah hadirnya perasaan tidak senang, tidak nyaman, dan tidak menenteramkan dalam diri seseorang, atau sekelompok orang, atau masyarakat, ketika menghadapi atau berhadapan dengan adanya perlakuan atau diperlakukan oleh orang lain, atau kelompok lain, atau masyarakat lain. Pada batas-batas tertentu, kondisi demikian bisa hadir sebagai **perlakuan diri** seperti tuntutan berlebih secara subjektif atas hak-hak yang harus diterima daripada pihak lain, atau sebaliknya, karena **diperlakukan oleh** pihak lain, yang dinilainya sebagai tidak

adil, tidak manusiawi, atau perlakuan itu, bertentangan dengan peradaban, atau adat-istiadatnya. Perlakuan yang tidak menyenangkan itu, bisa dijalankan secara sengaja atau tidak sengaja, secara spontan atau sistematis, dengan tanpa tujuan yang direncanakan terlebih dahulu, atau karena adanya tujuan yang sudah diatur sedemikian rupa sebelumnya, guna merusak, atau mengambil alih, atau tidak memberi kesempatan untuk kepentingan-kepentingan bersama. Oleh karena itu, konflik bisa bersifat sangat individual atau bisa bersifat kolektif. Sedang tahapan konflik bisa secara frontal atau gradual yaitu melalui suatu proses dari kecil lalu membesar, dari sikap antipati sampai pada saling berhadapan. Adapun perwujudannya, konflik bisa terwujud secara tersembunyi, atau secara terbuka.

Konflik yang tersembunyi atau laten adalah konflik yang tidak secara jelas bisa diamati. Konflik laten bisa lahir dari suatu kondisi yang tidak seimbang di antara dua belah pihak, yaitu pihak yang merasa kecil, kalah, dan karena itu terpinggirkan, dengan pihak yang merasa atau dianggap besar, menang, dan bermaksud atau dianggap akan meminggirkan. Perasaan atau anggapan demikian, dapat dilihat atau muncul karena *prejudice*

dan bisa juga karena kompetisi. Kalau kompetisi kedua belah
pihak dalam ketidakseimbangan dalam potensi atau kekuatan,
konfrontasi bukan tidak akan keluar, melainkan belum keluar.
Tetapi apabila ketidakseimbangan itu berubah, setidaknya
pihak yang semula kecil dan kalah tumbuh menjadi suatu
kekuatan yang militan, maka ukurannya bukan soal kecil lawan
yang besar, melainkan kepada kesanggupan menyikapi keadaan.
Apabila cara mensikapinya dengan sikap kebencian dan
permusuhan kepada orang lain atau pihak lain sudah dalam
keadaan saling berhadapan, maka konflik sudah menjadi bersifat
terbuka.

1. Konflik yang terbuka maupun tersembunyi, dalam satu
sisi bisa dilihat sebagai dinamika sosial. Sebagai dinamika sosial,
konflik bisa ditempatkan dalam kondisi netral. Artinya, tidak
setiap konflik adalah buruk. Konflik, bukanlah buruk, sepanjang
munculnya gejala konflik dapat ditanggapi sepadan dengan
kemampuan untuk mengelola konflik tersebut. Dalam kondisi
demikian, konflik bisa melahirkan dinamika. Konflik seperti ini
output atau keluarannya bisa berupa kreativitas-kreativitas
baru yang sebelumnya tidak dipikirkan. Kondisi demikian bisa

dianalogikan dengan stress bagi seorang individu. Stress adalah suatu kondisi psikologis yang dirasakan oleh seseorang sebagai tantangan atau tekanan. Jika ia diperlakukan sebagai tantangan, biasanya akan menjadikan seseorang itu semakin memiliki daya tahan. Akan terjadi sebaliknya, yaitu kalau ia diperlakukan sebagai tekanan dan beban, maka stress bisa berubah menjadi *distress*, suatu kebingungan untuk mencari jalan keluarnya. Dan itu adalah problem.

Ketika konflik memberi pengaruh kepada terganggunya kenyamanan bagi perasaan, pikiran, dan tindakan bagi banyak orang guna menjalankan tugas sesuai perannya, maka konflik dalam pengertian ini, cenderung berkonotasi negatif. Kalau berkonotasi negatif dan diasumsikan akan membawa dampak-dampak negatif, maka pikiran sehat kita mengatakan, bahwa konflik-konflik seperti itu perlu dieliminasi sedemikian rupa. Pengeliminasian konflik sama artinya dengan pengelolaan konflik atau manajemen konflik.

Dengan cara yang bagaimana mengeliminasi konflik-konflik tersebut? Untuk memberi jawaban dan memberikan jalan keluarnya, dibutuhkan pemahaman yang memadai, bukan

mengetahui level-level atau jenis-jenis konflik; proses-proses muncul dan berkembangnya konflik; sumber-sumber atau akar-akar konflik, tetapi juga perlu memahami bagaimana masyarakat yang bersangkutan memaknai konflik dan mengudari atau menyelesaikan konflik³. Pemahaman demikian itu adalah pemahaman mengenai kebudayaan konflik. Ini artinya, intervensi untuk dapat menyelesaikan konflik secara damai, dan anti kekerasan, hanyalah mungkin kalau kita juga memahami kebudayaan konflik masyarakat sasaran.

Pada masyarakat sasaran kita temukan adanya dua fenomena yang menarik. Pertama, masyarakat yang membiarkan konflik terbuka terjadi. Kedua, masyarakat yang untuk sementara “mampu” menutupi, atau mencegah timbulnya konflik. Munculnya konflik terbuka maupun dapat tercegahnya konflik terbuka, dipahami karena diakui adanya kekuatan-kekuatan bersama yang mendorong. Kekuatan-kekuatan yang mendorong itu, tidak selamanya bersifat fisik,

³ Setiap masyarakat yang sering mengalami konflik atau ketegangan-ketegangan sosial, di dalam dirinya ada kekuatan-kekuatan untuk menciptakan keseimbangan-keseimbangan sosial lewat proses yang disebutnya *self maintain process* (Parson, dikutip oleh Gomang, 1994: 30). Dan selanjutnya, bentuk dari *self maintain process* itu bisa berupa bertahan, menyerang, berpindah atau menghindar – tergantung dari pertimbangan rasional mengenai kekuatan pressure-nya.

sesuatu yang bisa diamati misalnya lewat antisipasi kekuatan militer, tetapi juga kekuatan-kekuatan lain, seperti kekuatan tokoh-tokoh sosial yang memiliki kewibawaan, maupun tokoh-tokoh yang dalam alam pikiran kultural, disebut sebagai *cultural heros*. Kekuatan pencegahan itu seringkali ditandai oleh pertanda awal (*early warning*) berupa sistem-sistem alarm (*alarm systems*) dan kearifan-kearifan lokal.

Di luar itu, konflik bisa mereda ketika pihak-pihak yang berkonflik sudah mulai kehilangan energi. Hilangnya energi, memunculkan kemauan bersama untuk gencatan senjata meskipun sifatnya sementara. Jika tidak demikian, konflik bisa mereda karena pihak-pihak yang berkonflik, menyadari adanya kepentingan yang lebih besar sehingga mereka sepakat untuk mengakhirinya, misalnya dengan munculnya kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara.

3. Konflik Kekerasan di Indonesia

Di balik kemegahan Candi Borobudur, sang mahakarya peradaban, tersimpan cerita kekerasan⁴, intrik, ambisi, dan pengkhianatan para penguasa Nusantara. Budaya kekerasan

dan pengaruh berlanjut ke masa kesultanan, penjajahan, dan kemerdekaan. Di era Orde Baru dan hingga kini, budaya kekerasan itu berperan sebagai penguasa Indonesia dari balik layar⁵.

2.9. Dalam sejarah Indonesia, konflik kekerasan sudah dimulai dari Ken Arok di Singosari sampai dengan Amangkurat I di Mataram. Dalam buku *The History of Java*, Raffles menceritakan betapa sadis Amangkurat I: "Bila ia merasa tak enak hati, ia selalu menghabisi orang yang menjadi sumber ketidaksenangannya." Ia bahkan pernah mengumpulkan 6000 orang (para agamawan beserta keluarganya) ke alun-alun, dan membunuhnya tak kurang dari waktu 30 menit. Atau cerita

⁴ Dalam definisi yang konvensional, kekerasan terfokus pada penggunaan kekuatan-kekuatan fisik untuk melukai, atau merusak pihak lain. Kekerasan tidak selalu karena alasan ketimpangan ekonomi, tetapi bisa juga karena perasaan ketersinggungan yang muncul sebab pelecehan terhadap sesuatu yang dihormati, seperti pelecehan terhadap simbol-simbol agama. (Hall, 2001). Konflik kekerasan adalah konflik yang termanifestasikan dalam bentuk kekerasan. Kekerasan itu sendiri adalah tindakan yang melukai fisik, atau pikiran atau perasaan pihak lain, atau pengrusakan terhadap segala hal yang berharga. Tindakan itu sendiri dilakukan secara sengaja karena merasa memiliki kekuatan atau justru karena dorongan untuk mengalahkan kekuatan. Akibat dari kekerasan demikian itu bisa berupa luka fisik atau kematian, sakit hati dan dendam, ataupun kerugian material, atau keseluruhannya itu.

⁵ Santoso, Iwan. 2003. "Budaya Kekerasan",

(<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0311/08/Jendela/675903.htm>)

dari *Babad Tanah Jawi* yang menunjukkan betapa sadis Amangkurat II. Ia menikam dan mencincang Trunajaya, lantas membagi-bagikan hatinya agar dimakan para bupati yang hadir di suatu balairung pembantaian itu.

Pada masa kolonial, kekerasan terjadi karena ketidakadilan politik pemerintah kolonial yang bersifat *other-centric*. Paham ini membuat kebijakan di Nusantara berkiblat kepada kepentingan Hindia Belanda sebagai entitas politik. Kebijakan yang diambil mengacu pada kepentingan Belanda sebagai negara induk. Penjajah Belanda itu telah mengajar banyak hal negatif kepada warga bangsa Indonesia, di antaranya adu domba dan tindakan kekerasan.

Adu domba kepada raja-raja dan keturunannya, atau antara kerabat kerajaan dengan rakyatnya sendiri, adu domba juga dilakukan dengan cara membuat pemilahan sosial warga bangsa, seperti warga bangsa Eropa, warga bangsa Asia, dan warga bangsa Inlander, alias warga bangsa Indonesia. Lewat adu domba dan berbagai intrik tadi, melahirkan berbagai pergolakan dengan dan melalui kekerasan-kekerasan.

Pada akhir masa Orde Lama, kekerasan dalam skala besar dilakukan misalnya dengan desain bergolaknya gerakan

Orde Baru ketika menumpas G30 S/PKI. Anak bangsa ini
tidak hanya siapa yang menskenario kekerasan-kekerasan
itu tetapi faktor perebutan kekuasaan sering
mendominasi di balik *conflict by design* dimaksud. Kemudian era
Orde Lama itu berganti atau digantikan oleh pemerintahan
Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto yang juga tidak
lepas dari praktik kekerasan.

Pada era Orde Baru telah diberlangsungkan mata
militerisasi dalam hubungan sipil- militer sebagaimana
yang kita kenal kebijakan dwi-fungsi abri yang ternyata dalam
aplikasinya di lapangan telah mengalami banyak distorsi, baik
dalam kancah politik, kemasyarakatan, dan ekonomi.

Dwifungsi Abri dalam ranah politik, termanifestasikan
ke dalam bentuk kekaryaan militer dalam jabatan sipil serta
intervensi pendekatan militeristik dalam birokrasi. Jika kita
telah secara substansial, fenomena itu menggambarkan kepada
kecenderungan di kalangan militer sendiri untuk melakukan
penguasaan sumberdaya ekonomi-politik, kontrol politik militer,
dan dominasi militer atas warga sipil. Akibat dari praktik
penguasaan ini ialah melemahnya elemen dan hak-hak sipil

untuk membangun demokrasi, serta merebaknya pembudayaan kekerasan. Setiap ada konflik sosial yang berlatar politik, militer mengambil porsi menyelesaikan dengan cara-cara kekerasan.

Dalam ranah kemasyarakatan, dwifungsi Abri itu dimanifestasikan ke dalam “penjagaan” teritorial. Dalam hal ini militer terlibat dalam menangani masalah keamanan yang sebenarnya menjadi tugas kepolisian. Penanganan masalah-masalah keamanan tidak dilakukan secara persuasif apalagi dalam bentuk musyawarah, tetapi lebih kepada model pendekatan keamanan yang militeristik. Akibat dalam kehidupan sosial seperti itu, tidak saja memperlemah posisi dan peran polisi tetapi juga terbiasa dan terpeliharanya budaya kekerasan. Di samping itu, Kondisi demikian itu dalam satu sisi akan memperlemah kemandirian masyarakat sipil, dan pada sisi lain, akan menjadikan ketergantungan kepada militer. Militer bukan saja menjadi pelaku tetapi juga menjadi alat untuk melakukan kekerasan ketika terjadi perbedaan dan perselisihan di antara warga sipil, apalagi kalau perselisihan itu terjadi antara sipil dengan militer.

Dalam ranah ekonomi, militer bahkan polisi mulai masuk ke dunia bisnis, atau menjadi *backing* bagi kelompok-kelompok bisnis. Ketika militer ikut bermain dalam kegiatan bisnis, maka sengketa dalam persoalan bisnis dengan pihak lain diselesaikan lewat ancaman dan kekerasan. Akibatnya, pihak-pihak yang bisa "membeli" militer, semakin bertingkahtaku tanpa mengindahkan aturan main atau etika sosial-ekonomi. Mereka merasa terlindungi. Apa arti keseluruhannya itu? Penyelesaian berbagai persoalan politik, ekonomi, dan sosial, cenderung dilakukan lewat solusi kekerasan⁶. Dari sinilah gejala-gejala premanisme dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial mulai dikenal dan diperkenalkan. Penyelesaian dengan kekerasan seperti itu, adalah penyelesaian dengan mengandalkan adu otot dan *waton gedhe jegoge*.

Kekerasan demi kekerasan yang tidak pernah tidur di bumi Indonesia ini, mungkin juga karena terilhami oleh faham machiaveillian. NICOLLO Machiavelli, seorang filosof politik, mendalilkan bahwa kekerasan (represi) adalah absah digunakan

⁶ Kajian lebih lanjut, lihat hasil penelitian IRE pada

<http://www.ireyogya.org/ire.php?about=penelitian.htm>.

untuk tujuan kekuasaan. Perlu diketahui, latar-belakang mengapa Machiavelli berdalil seperti itu, awal mulanya adalah karena terjadinya peperangan yang melegitimasi piranti-piranti kekerasan di masa Alexander II dan Julius Caesar II, Caesar Borgia dan Keluarga Medici, Maximilian dan Louis XII. Melihat praktik kekerasan yang dilakukan oleh kaisar seperti itu, membuat Machiavelli gerah. Ia lantas merumuskan teori kenegaraan modern, yakni menyarankan penggunaan kekuatan represif untuk membangun sebuah negara yang kuat. Jalan satu-satunya untuk menghentikan peperangan adalah hadirnya seorang pangeran yang kuat, yang mampu menyatukan kekuatan manusia dan hewan. Teori pencapaian kekuasaan dengan segala cara ala machiavellianism ini dikutuk oleh negara-negara masa kini, tokoh-tokoh politik, agamawan serta masyarakat lain umumnya karena bertentangan dengan humanisme/HAM. Namun, betapapun demikian, kutukan tersebut nampak hanya dalam konsep saja. Realitasnya, cara untuk mencapai kekuasaan dengan kekerasan, baik fisik maupun nonfisik; baik karena dominasi atau hegemoni; baik langsung atau tidak langsung; di dunia modern ini nampak semakin sering

digunakan. Terorisme yang dilakukan negara atau kelompok tertentu dalam masyarakat adalah contoh baik untuk disebut⁷.

Pergantian kekuasaan di negeri ini sama sekali tidak mencerminkan demokratisasi. Jika terdefinisi sebagai “demokrasi”, maka dalam praktiknya adalah “demokrasi seolah-olah” (*quasi-democratisation*) karena dalam praktiknya diwarnai dengan dan melalui kekerasan terutama dalam kerangka perebutan kekuasaan. Perjalanan waktu dalam era reformasi ini, kita menyaksikan sendiri bagaimana otoritas kekuasaan kehilangan orientasi untuk mewujudkan ketertiban umum. Dalam bahasa Benny Susetyo (2002), “mereka tak mampu mengatasi budaya premanisme yang menjamur di kalangan sipil dengan menggunakan baju keagamaan, kedaerahan, kesukuan, dan kepartaian. Ini akibat negara juga mengembangkan budaya premanisme yang hampir serupa, yakni kerap mengintimidasi dan meneror”.

Negara berkewajiban menghentikan kekerasan, tetapi bagaimana pula kalau negara dalam menyelesaikan persoalan masih suka menggunakan kekerasan? Adakah ini permakluman?

⁷ Lihat juga tulisan Benny Susetyo Pr (2002)

Celakanya, kekerasan itu tidak diselesaikan dengan tuntas sehingga berpotensi meledak menjadi kekerasan pada masa-masa berikutnya. Perasaan dendam di antara pihak-pihak yang bertikai tidak dikelola dengan baik, sehingga dendam yang ada sewaktu-waktu berpeluang meledak menjadi kekerasan baru dan biasanya dalam skala yang lebih besar. Dalam konteks ini, kita menjadi seperti tidak memiliki referensi menyelesaikan masalah-masalah kekerasan secara dewasa⁸, atau kekerasan demi kekerasan itu memang dipelihara karena *mindset*⁹ yang ada dalam kepala: *homo homini lupus*.

4. Kekerasan Agama dalam Konteks Negara Bangsa

Ada setidaknya tiga penjelasan bagaimana kekerasan dibawa ke ranah agama. **Pertama**, agama dibawa-bawa oleh negara dan penguasa untuk menjustifikasi dan melegitimasi keputusan-keputusan politik kekuasaan. **Kedua**, pihak-pihak

⁸ Mujiran, Paulus. Berdemokrasi di tengah Ancaman Kekerasan dalam Suara Pembaharuan Daily. (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0311/08/Jendela/675903.htm>).

⁹ *Mindset is a standard for modeling our thinking. Mindset consists of a modeling language and various implementation* (<http://www.answers.co topic/mindset?cat=health>).

yang memanfaatkan dan mengatasnamakan lembaga-lembaga agama yang mengembangkan sayap kekuatan untuk merespons keputusan politik dan praktik - praktik pemerintahan, atau memanfaatkan ideologi keagamaan untuk kepentingan-kepentingan lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, kelompok-kelompok keagamaan, atau partai-partai yang mendasarkan diri pada azas keagamaan itu sendiri. **Ketiga**, individu-individu yang merasa terpanggil untuk menghentikan kekerasan, kemaksiatan, dan berbagai keburukan lainnya menurut tafsiran-tafsiran sesuai selera yang merasa terabsahkan bagaimana menyelesaikan persoalan dimaksud dengan menggunakan kekerasan.

Penggunaan agama sebagai alat justifikasi bagi negara, seringkali memiliki dua sayap. Sayap pertama berupa pemanfaatan agama untuk memudahkan program dan proyek-proyek pemerintah itu bisa diterima rakyatnya. Pada sayap ini, terjadi pengerahan secara besar-besaran para tokoh agama untuk menjelaskan “kemauan yang baik” pemerintah, seperti program Keluarga Berencana. Wacana keagamaan dalam konteks “keluarga baik,” diukur lewat entitas atau kuantitas

jumlah anak dalam keluarga. Ketika agama dipakai sebagai alat sosialisasi, maka dalam aplikasi di lapangan hampir selalu terjadi distorsi-distorsi karena hampir semua program pemerintah itu dievaluasi keberhasilannya berdasarkan target pencapaian. Dalam konteks seperti ini, aparat-aparat pemerintah, tidak lagi bicara soal proses dan kondisi-kondisi yang menjadi persyaratan yang menjadikan “pencegahan kehamilan dan kelahiran” itu diperbolehkan menurut syariat agama. Para aparat pemerintah, tidak hanya tidak tahu mengenai bagaimana landasan syar’i dalam konteks seperti ini, tetapi juga karena kemauan pragmatis negara yang harus dijalankan, dalam hal mana mereka menjalankan tugas atas nama negara dan evaluasi kinerja aparat itu sendiri. Di sinilah pemaksaan kehendak bahkan kekerasan seperti “disahkan” kehadirannya dengan mengatasnamakan agama.

Pada sayap kedua, adalah memperlakukan hak negara untuk menentukan mana agama yang disahkan dan karena itu ada agama yang tidak sah. Negara mensahkan suatu agama tertentu sama artinya kekuasaan negara melampaui kekuasaan Tuhan itu sendiri, sehingga memunculkan kondisi seperti berlangsungnya kekerasan agama. Kekerasan dilakukan oleh

suatu kelompok agama kepada kelompok agama lainnya. Tuhan dibayangkan sebagai "pecandu perang" sehingga kekerasan dan perang dimaknai sebagai "persembahan" kepada Sang Tuhan. Dalam bahasa Komarudin Hidayat, "atas nama Negara, sebuah rezim bisa memberangus agama karena beranggapan, berbeda agama berarti berbeda Tuhan, dan perbedaan berarti ancaman bagi yang lain sehingga negara tampil sebagai hakim"¹⁰. Dalam konteks ini, agama lebih dilihat sebagai institusi, dan tidak dalam apresiasi. Di sinilah perilaku ambevalensi negara dalam kaitannya dengan agama. Agama hanya dipanggil ketika ada kebutuhan legitimasi dan dicampakkan ketika menagih tanggung jawab moral¹¹.

Penggunaan agama oleh lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok keagamaan dalam bentuk-bentuk kekerasan, bisa dan mudah timbul ketika ia dibawa ke dalam ranah politik kekuasaan. Di sinilah "ada" bahayanya jika agama dibawa ke dalam ranah politik. Bahaya itu muncul ketika penggunaan agama, tidak dalam konteks landasaan etik, melain-

¹⁰ Hidayat, 27-10-2006: 6).

¹¹ Lihat Gazali, 2003

kan sebagai identitas. Ketika agama sebagai identitas, maka muncul kecenderungan bagi “pemilik” lembaga ataupun partai politik, melakukan dua hal sekaligus yaitu (1) kepentingan disakralisasi dengan mengatasnamakan Tuhan, dan (2) menghakimi pihak lain yang berbeda pandangan sebagai pandangan yang menyesatkan, sehingga dengan mudah menyelesaikan persoalan perbedaan pandangan tadi dengan tindak kekerasan atas nama menjaga kebesaran Tuhan. Dengan proposisi “atas nama Tuhan”, maka logika yang dimainkan oleh penganut yang sekaligus merasa sebagai “pemilik” agama itu adalah “pembenaran”, sehingga kecenderungan umum manusia adalah menyuguhkan gejala-gejala atau fakta-fakta yang diikuti dengan interpretasi secara *ethnocentric*. Di sinilah lalu “permusuhan” dan “kekerasan” adalah disahkan atas nama (agama) Tuhan.

Hadirnya berbagai kekerasan yang dialamatkan atau yang dilakukan oleh mereka yang secara luaran menggunakan atribut-atribut agama, hingga dewasa ini masih sering terjadi. Budaya kekerasan yang berlaku dan dilakukan oleh “umat” beragama dalam kehidupan sosial yang majemuk seperti

Indonesia ini, akarnya bisa dilihat dari dua sisi, internal dan eksternal.

Pada **sisi internal**, kekerasan itu bisa lahir karena **pertama**, kecintaan yang terlalu mendalam (fanatisme-sempit) terhadap agama yang dipeluk sehingga menafikan adanya agama-agama lain di luar sana. Nalar keagamaan seperti ini, diakui atau tidak, masih sering muncul dari para penyiar agama-agama itu sendiri. **Kedua**, munculnya ketidakpuasan dalam berbagai lapangan kehidupan seperti dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, hukum, dan sebagainya. Keresahan kolektif atas kondisi yang “sangat tidak ideal” seperti rusaknya tatanan hukum, lemahnya penegakan hukum terhadap pengianatan bangsa seperti yang dilakukan oleh para koruptor, merebaknya pornografi, rusaknya tatanan sosial, dan sebagainya, ditarik langsung sebagai akibat negara, pemerintah, dan masyarakat, tidak menggunakan landasan agama “yang dipeluknya”.

Kecintaan yang terlalu mendalam (fanatisme-sempit) terhadap agama yang dipeluk, merupakan pertanda dari “gagalnya” para tokoh agama bagaimana “membumikan” agama dalam kehidupan sosial yang beranekaragam, baik keragaman

dalam tataran *nurture* maupun *culture*. Ketika para pemeluk agama ini sudah tumbuh keyakinan bahwa “agama yang dipeluknya”-lah yang benar, dan tidak ada penjelasan lain bahwa mereka yang berada di luar, juga memiliki hak untuk menyatakan yang sama terhadap agamanya, maka tindakan pihak-pihak yang berbeda agama, kendatipun tindakan itu berlabel “ibadah” atas nama agamanya masing-masing, cenderung dinilai sebagai ancaman bagi kelompok pemeluk agama yang berbeda. Apalagi kalau fenomena seperti itu ditarik secara melebar ke ranah politik atau ekonomi.

Karena melihat pihak lain sebagai “ancaman”, maka bahasa yang digunakan dan disosialisasikan adalah bahasa-bahasa yang mengandung cita rasa “kekerasan”, seperti “waspada”, “pelecehan agama”, “kemungkaran”, kekafiran, dan perang. Dari sinilah skala konflik-keagamaan mulai memperoleh tempat persemaian. Ketika “peneguhan iman” dalam satu segi sudah menguat, dan kecurigaan atas perlakuan atau tindakan umat lain, ditafsirkan sudah mengedepan, maka perang dan memerangi orang-orang kafir (karena melakukan secara sengaja berbagai kemungkaran) di bumi ini, menjadi adagium

keagamaan itu sendiri. Melakukan kekerasan lantas tidak ditempatkan sebagai “kekeliruan” di dalam menerapkan ajaran agama, tetapi justru ditempatkan sebagai tanda oleh pelakunya tentang masih adanya *spirit* (*ghirrah*) keimanan diri.

Membiarkan *mindset* atau cara berfikir dan cara menanggapi *the self* dan *the others* demikian, maka akan mudah diramalkan bahwa keberagamaan agama yang ada itu akan tetap menjadi lahan subur untuk lahirnya konflik sosial, kendatipun bersifat laten.

Konflik yang bersifat laten akan mudah berubah menjadi konflik *manifest* ketika ruang untuk itu memungkinkan. Konflik akan menjadi *manifest* kalau ketidak-adilan, lemahnya penegakan hukum, dan merosotnya moral masyarakat secara kolektif, ditanggapi sebagai tidak semata-mata karena ukuran kualitas keimanan individu-individu, tetapi lebih dilihat secara agregat sebagai tanda (1) tumbuhnya sikap masa bodoh negara terhadap keadaan yang dinilai sudah jauh meninggalkan nilai moral, dan (2) banyaknya tokoh agama yang mulai lebih tertarik kepada kepentingan pragmatis seperti kekuasaan dan materi. Fenomena itulah yang menghadirkan kepada sejumlah orang

untuk melihat keadaan tadi sebagai tantangan bagi umat yang masih punya iman. Dari sinilah lalu muncul kebutuhan spiritualitas keagamaan yaitu merindukan Tuhan melalui caranya sendiri, sekalipun cara-cara yang ditempuhnya, adalah cara kekerasan.

Tindakan seperti itu, bisa saja timbul dan hidup dalam persemaian selama mereka melihat berbagai kebobrokan moral aparat pemerintah maupun rakyat sebagai akibat langsung dari 'berpaling dari agama'. Karena itu, tumbuh kebutuhan mereka untuk menjadikan dua hal, yaitu mengembalikan agama, tidak saja menjadi landasan ideal tetapi juga landasan hukum (*syar'i*) dalam kehidupan bersama. Islam sebagai agama dan negara (*innal al Islam Din wa Daulah*), dan setiap umat Islam berkewajiban memurnikan bukan saja ajaran tetapi juga dalam praktik-praktik keagamaan menurut teks agama.

Dalam pandangan kelompok ini, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan semata, tetapi juga memuat ajaran tentang hubungan antarsesama manusia, baik dalam aspek sosial maupun politik kenegaraan. Dalam format demikian, Islam merupakan tipikal sosio-politik, di mana fungsi

agama dan politik tidak dapat dipisahkan melainkan harus terbentuk secara formalistik-legalistik dalam satu wadah yang bernama “Negara Islam”.

Gagasan politik Islam demikian itu, bergerak ke arah penguatan basis umat Islam sebagai modal politiknya dan menempatkan Islam sebagai ideologi gerakannya. Keduanya bergerak dengan dilandasi teologi politik yang kuat dan mengakar dalam ide dan sikapnya sebagai penganjur **gerakan Islam fundamentalis** atau **radikalis**.

Pengertian **radikalisme**¹² itu sendiri adalah “prinsip-prinsip atau praktik-praktik yang dilakukan secara radikal”¹³. Ia merupakan kata lain dari ekstremisme,¹⁴ militanisme, atau fundamentalisme.¹⁵ Istilah-istilah itu digunakan dalam banyak pengertian yang berbeda-beda, tetapi yang jelas, istilah-istilah tersebut tidak terbatas tertuju pada Islam, termasuk juga tidak terbatas pada kegiatan agama, karena banyak contoh tentang

9. Secara etimologi, istilah radikalisme berasal dari kata: *radix* artinya akar (*root*) kemudian mendapat tambahan morfem akhir “al” menjadi radical. Dalam kamus *The American College Dictionary* (1961: 998) kata radikal memuat arti al: (1) *going to the root or origin; fundamental*; (2) *thorough going or extreme esp. in the way of reform*; (3) *belonging or pertaining to*

fundamentalisme dalam beberapa gerakan politik yang mempunyai ideologi-ideologi sekuler, jika bukan ateis¹⁶ yang memiliki watak radikal.

Ciri-ciri umum dari fundamentalisme Islam ialah: (a) gerakan-gerakan Islam yang secara politik menjadikan Islam sebagai ideologi dan secara budaya menjadikan Barat sebagai *the others*; (b) memiliki prinsip yang mengarah pada paham perlawanan (*oppotionalisme*); (c) penolakan terhadap hermenitika karena pemahaman al Quran sepenuhnya adalah skriptualistik; dan (d) secara epistemologis, dalam wilayah gerakan sosial-politik menolak pluralisme dan relativisme; serta (e) penolakan perkembangan historis dan sosiologis, karena dalam pandangan mereka, "umat manusia yang tengah melaku-

a political party favoring drastic reform; (4) *forming the basis or foundation*; (5) *existing inherently in a thing or person: radical defect of character*. Karena itu, radikalisme dalam konteks pemikiran dan tindakan menurut kamus tersebut diartikan: (1) *he holding or following of radical or extreme views or principles*; dan (2) *the principles or practices of radicals*.

¹³ *The American College Dictionary* (1961: 998)

¹⁴ Effendi & Sirry, 2003: 105

¹⁵ Bukhori, 1986: 57; J.G. Jansen:1986; 1979 dan Ruthven, 1984; via Priyono, 2003: 15.

¹⁶ Burrel, 1995: 2.

kan aktivisme sejarah di dunia harus menyesuaikan teks al Qur'an, bukan sebaliknya!"¹⁷.

Sementara konsep "religio politik" di sini analog dengan "sosio-politik". Jika yang akhir ini dimaknai sebagai "kekuatan dan penguatan politik dalam kehidupan sosial", maka "religio-politik" bisa dimaknai sebagai "kekuatan dan penguatan politik dalam kehidupan keagamaan". Kata "politik" di samping bisa mengacu pada "kegiatan berpolitik", bisa juga mengarah dan diarahkan kepada "strategi" (baca: strategi adaptasi atau strategi merespons) yang berkembang dan yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat dalam kerangka meneguhkan, mengembangkan, atau mempertahankan diri sesuai apa yang mereka ketahui dan yakini mengenai ajaran agama yang dipeluknya. Dengan demikian, "radikalisme religio politik", secara spesifik berarti "paham-paham, sikap-sikap, dan strategi-strategi termasuk praktik-praktik (tindakan) yang berjalan dan dijalankan oleh kelompok-kelompok masyarakat (keagamaan) dalam kerangka meneguhkan, mengembangkan, atau memper-

¹⁷ Abegebriel dan Syitaba, 2004: 506-7

tahankan ajaran agama yang diikuti dengan cara-cara radikal". Tindakan radikal dipilih bisa karena dipahaminya sebagai ajaran, pandangan, atau persiapan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan kepentingan agama maupun kepentingan warga komunitas keagamaan itu sendiri, atau karena adanya tekanan-tekanan dari luar.

Dalam bidang politik, seperti halnya dalam bidang agama¹⁸, radikalisme atau terkadang disebut fundamentalisme¹⁹,

¹⁸ Di kalangan masyarakat Indonesia, istilah agama hrs dibedakan dalam arti politis dan arti ilmiah. Arti politis, yang disebut agama yaitu "suatu kepercayaan kepada Tuhan serta dengan ajaran, kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaannya itu, sejauh diakui oleh pemerintah RI. Sedang dalam arti ilmiah, agama ialah suatu kepercayaan kepada Tuhan/dewa dsb, serta dengan ajaran, kebaktian dari kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaannya itu. Agama dalam arti ini disebut religi (Paassen, 1978: 20; Koentjaraningrat, 1974: 137-142).

¹⁹ Istilah fundamentalisme bisa berarti "faham yang berusaha untuk memperjuangkan atau menerapkan apa yang dianggap mendasar. Kemunculan diskursus "fundamentalisme keagamaan" ini, pertama kali muncul di kalangan Kristen (Ilyas Ba Yunus via Hasyim, 2002: 9). Dalam sebuah artikelnya, "*The Myth of Islamic Fundamentalism*", Ilyas menjelaskan bahwa diskursus fundamentalisme untuk yang pertama kali muncul dalam sebuah konferensi mengenai Bible 1878 yang diselenggarakan di Niagara Falls New York. Konferensi ini dihadiri terutama oleh kalangan pemimpin Baptis, Presbyterian, dan aktivis gereja. Salah seorang dari peserta (?) yaitu Sheila McDonough, memilih istilah **fundamentalisme** untuk menjelaskan fenomena pemikiran radikalisme Islam yang diperkenalkan oleh Maulana Maududi mengenai revitalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan dunia" (Hasyim, 2002: 8-9).

diberi arti sebagai suatu pendirian yang tegas dan tidak ragu-ragu bahwa keyakinan-keyakinan tertentu tentang suatu kebenaran – biasanya diambil dari teks-teks suci – merupakan kewajiban orang-orang beriman untuk menggiatkan kehidupan mereka dan mengarahkan aktivitas-aktivitas mereka sesuai dengan keyakinan-keyakinannya itu, sehingga untuk beberapa hal membenarkan penggunaan istilah “militan”.²⁰ Militansi di sini, umumnya terkait pada ciri usaha merombak secara total suatu tatanan politik atau tatanan sosial yang ada dengan menggunakan kekerasan dan dengan semangat militan. Sikap militan itu ditunjukkan dari gerakan-gerakannya yang bersifat agresif, gemar atau siap “berjuang”, bertempur, berkelahi, atau “berperang”, terutama untuk memperlihatkan pengabdian mereka yang total terhadap suatu cita-cita. Sikap radikal dan tidak-toleran demikian itu, adalah karena “mereka menyederhanakan persoalan yang ada dalam suatu masyarakat secara berlebih-lebihan. Mereka melakukan *oversimplifikasi* terhadap persoalan yang ada”²¹

³ Burrell, 1995: 3.

Pilihan kepada sikap radikal demikian itu, sering mengalami ketegangan bahkan terkadang konflik²² dengan lingkungan mereka. Dalam suasana ketegangan itu pula, kesan Islam yang "*rahmatan lil 'alamin*"; sering dipertanyakan oleh warga masyarakat luar yang sudah terbiasa hidup di dalam kehidupan

²¹ Bukhori, 1986: 68.

²² Dilihat dari teori konflik, kehidupan manusia dalam masyarakat didasari oleh konflik kekuatan, yang dikarenakan bukan semata-mata karena faktor ekonomi, tetapi juga karena berbagai aspek seperti politik dan agama. Dalam hal politik misalnya, persaingan antara dua kelompok atau lebih untuk memperebutkan posisi atau kekuasaan penentu dalam kebijakan umum mengenai penguasaan, alokasi, dan pendistribusian dari sumber-sumber daya yang terbatas, sehingga mereka yang miskin kekuasaan, yang terkena oleh pembatasan-pembatasan secara organisasi oleh yang mempunyai kekuasaan, akan berada dalam konflik dengan mereka yang memiliki kekuasaan. Pemerintahan Orde Baru misalnya, ia mempunyai kecenderungan "menyandarkan kekuasaannya pada kekuatan militer yang mempunyai kekuatan memaksa. Pola demikian, "menghasilkan pola-pola tindakan yang 'sewenang-wenang' yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berkuasa dan para aparatnya. Tidak ada mekanisme control yang efektif yang dapat menjadi rambu-rambu bagi tindakan-tindakan penyimpangan para oknum penguasa tersebut" (Suparlan, 1999: 13-4). Dalam keadaan demikian, "mereka yang tidak mampu untuk melawan atau menolaknya, dan tidak mampu untuk menghindarinya, akan mengembangkan perasaan kebencian yang terpendam terhadap pihak lawan. Kebencian itu, seringkali akan ditarik ke dalam kebencian yang bercorak akumulatif" (Suparlan, 1999: 11) dan kolektif. Karena itu konflik oleh Dagrendorf (via Suparlan, 1999: 9) dilihat sebagai sesuatu yang endemic (baca: yang selalu ada dalam kehidupan manusia bermasyarakat).

yang multi-kultural²³ dan multi-etnik. Apalagi kalau cara-cara “memperjuangkan tegaknya Islam” dengan klaim jihad²⁴ untuk menegakkan *amar ma’ruf nahi mungkar* tetapi dengan cara-cara kekerasan.

Fenomena dari terjadinya terorisme sebagaimana yang akhir-akhir ini “terjadi” di Indonesia, akarnya bisa dilihat dalam dua sisi kepentingan yang bertabrakan dan ditabrakkan. Bertabrakan terjadi sebagai akibat “*undesigned actions*”, sedang ditabrakkan terjadi oleh adanya “*actions by design*”. Yang pertama, yaitu “*undesigned actions*” adalah karena peristiwa-peristiwa radikalitas keagamaan itu muncul sebagai bentuk atau respons “umat beriman” yang dengannya merasa terpanggil untuk melakukan perubahan - perubahan secara radikal, sekalipun

²³ Multikultural adalah keanekaragaman budaya yang ada seperti keanekaragaman budaya Indonesia. Fahaman yang memberi tempat secara seimbang kepada semua budaya yang ada itu disebut multikulturalisme. Dengan demikian, multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan.

²⁴ Secara etimologis, kata “jihad” berasal dari ‘jahada’ yang artinya: mengerahkan upaya; berusaha dengan sungguh-sungguh; berjuang keras. Namun dalam pengertian yang lebih teknis, kata ini digunakan untuk memerangi dan melawan segala hal yang dianggap mengancam Islam (Rumadi, 2002: 60).

harus menyerahkan jiwa sendiri. Tentu pilihannya itu – berdasarkan atas tafsir sepihaknya. Sedang ditabrakkan atau *actions by design* adalah strategi memenangkan kompetisi peradaban global yang berporos kepada kepentingan kekuasaan dan ekonomi kapitalistik pada tataran negara-negara.

Berdasarkan pada pendekatan *actions by design*, kemunculan terorisme bisa dijelaskan ke dalam dua sisi juga, yakni **sisi eksternal** dan **sisi internal**. Pada sisi eksternal, munculnya terorisme – dalam batas-batas tertentu bisa dilihat sebagai desain alias kepentingan negara-negara Barat, khususnya Amerika dan sekutunya. Desain itu bertolak pada *prejudice* Barat secara berlebihan. Dalam pandangan mereka, kebangkitan umat Islam akan membahayakan eksistensi kejayaan mereka. Agar Islam tidak bangkit, perlu dilakukan strategi, yaitu Islam harus dicitrakan sebagai sebuah agama yang kejam, yang tidak berkemanusiaan, dan yang gemar membunuh orang seenaknya. Target di balik pengembangan *prejudice* seperti itu ialah agar kebangkitan Islam akan ditolak oleh peradaban kemanusiaan. Untuk itu, Barat sengaja memberi ruang dan menciptakan ruang untuk timbulnya banyak

radikalisme di kalangan umat Islam sendiri.²⁵ Ketika sebagian umat Islam terjebak masuk ke dalam perangkap itu, lantas masyarakat Barat mudah membuat stigma. Islam dan umat Islam distigma dengan stigma: fundamentalisme, eksklusifisme, dan terorisme. Islam, hanyalah denominasi agama dan kepercayaan yang menghasilkan fanatisme²⁶."

Sedang dari **sisi internal**, "kaum teroris itu berdalih bahwa mereka melakukan untuk melawan Amerika dan sekutunya". Mengapa? Karena mereka berpandangan bahwa Amerikalah yang lebih dahulu mengajarkan dan mempraktikkan terorisme yaitu dengan membunuh/menghancurkan Afganistan dan Irak. Dari akar pandangan inilah maka mereka berdalih bahwa apa yang dikerjakan adalah sebagai imbalan dan perlawanan. Melawan Amerika dan sekutunya yang telah berbuat teror, didefinisikan sebagai terorisme *hasanah*, atau terorisme yang berkategori baik, karena didasarkan pada argumen keagamaan yang kuat²⁷. Dari paham ini pula, menjadi bisa dijelas-

²⁵ Lihat pula pada Thoifoer, 2007, khususnya pada hlm. 77-85.

²⁶ Zarkasyi, Hamid Fahmi. 2007. "Membangun Peradaban Islam yang Bermartabat".

<http://banihamzah.wordpress.com/2007/05/07/teori-pengaruh-terhadap-islam/>

²⁷ <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=966>

kan bahwa terorisme terjadi dalam tiga kemungkinan. yaitu: **pertama**, terdapat konspirasi besar dari luar yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. **Kedua**, terdapat teks-teks dalam Alquran dan Hadits yang dijadikan sandaran untuk melakukan kekerasan, dan **ketiga**, ada yang salah dalam proses pendidikan kita sehingga berpeluang melahirkan agen-agen teroris".¹ Namun demikian, apa pun istilah dan penyebabnya, cara-cara terorisme dengan dalih apa pun, adalah suatu kebiadaban. Dengan teror, agama-agama dan peradaban-peradaban manusia, tidak lagi menjadi tupangan hidup dalam kedamaian tetapi menjadi penyalur dan saluran kebencian, dendam, dan tindak kekerasan, apalagi kalau sasaran dari kesemuanya itu adalah mereka yang tidak tersangkut-paut ke dalamnya. Tuhan menciptakan dan menghidupkan manusia, tetapi mengapa di antara manusia itu sendiri membunuh sesamanya.

²⁸ Maemunah Sakdiyah, 2007.

<http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=966>

5. Keindahan Perbedaan

Setiap manusia dalam kehidupan sosialnya, memiliki status ganda. Sebagai pemeluk dan penyiar agama, tetapi juga sebagai warga bangsa. Untuk itu, bagaimana memposisikan diri sebagai pemeluk agama yang berbeda-beda dalam konteks Indonesia? Apakah agama yang berbeda-beda itu kita tempatkan sebagai piranti untuk memenangkan sebuah perlawanan atau untuk menyatukan. Jika untuk piranti memenangkan, maka siapakah sebenarnya lawan di sini? Apakah agama itu sendiri ataukah pemeluk agama yang berbeda. Jika agama itu sendiri, apakah agama-agama itu mengajarkan kesalahan dan kebiadaban? Bukankah agama selalu mengajarkan kebaikan dan kecintaan antarsesama? Jika yang kita lawan adalah pemeluk agama yang berbeda, apa salah mereka? Jika mereka mencederai atau melecehkan agama yang kita peluk, apakah pencederaan itu atas nama diri sebagai pemeluk agama, ataukah per se individu yang justru mereka tengah mencederai agamanya sendiri? Jika mereka berbuat tidak adil karena kekuasaan yang dipegangnya, maka ketidakadilan itu atas nama agamanya ataukah karena ketidakadilan itu hadir justru ketika mereka melalaikan ajaran agamanya sendiri?

Maka adalah setiap orang berhak untuk mendefinisikan agamanya itu sebagai agama yang memuat kebenaran dan kebaikan, yang berarti pula adalah hak pemeluk agama yang lain untuk melakukan hal yang sama.

Kalau demikian kenyataannya, lantas bagaimana melandasi etika bersama dalam konteks negara? Di sinilah kita – jika masih mau jujur kepada diri sendiri – antara agama dan negara mempunyai hubungan yang bersifat simbiotik, yakni suatu hubungan timbal balik yang saling memerlukan. Dalam satu sisi, negara (*state*) seperti Indonesia, memerlukan panduan etika dan moral sebagaimana diajarkan oleh agama. Sementara agama itu sendiri memerlukan kawalan negara untuk kelestarian dan eksistensinya. Dalam konteks Indonesia, maka Pancasila yang digunakan sebagai dasar negara dapat dilihat sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan mengingat dua hal, yaitu (a) roh dari lima dasar Pancasila itu sendiri bersesuaian dengan substansi ajaran pada setiap agama; serta (b) penggunaan Pancasila (bukan secara formal agama Islam) adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat-masyarakat Indonesia yang majemuk, baik dalam hal suku maupun agama.

Keaneragaman suku dan agama yang ada di Indonesia ini – diamanatkan oleh Tuhan – untuk saling mengenal dan bekerja sama – bukan untuk saling bercerai-berai. Kemajemukan demikian ini, mengajarkan kepada orang-orang yang beragama – untuk tidak berfikir egoistis, melainkan perlu bersikap toleran tanpa mengurangi prinsip-prinsip akidah dan etika keagamaan. Dengan demikian, agama tidak dilihat dan ditempatkan secara formal-legalistik melainkan diserap dan dijalankan sesuai dengan substansi maupun pesan dari ajaran agama itu sendiri.

Islam sama sekali tidak mewajibkan kepada umatnya untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara, tetapi yang lebih dipentingkan ialah berlakunya nilai dan substansi ajaran agama itu sendiri di dalam kehidupan sosial yang bercorak plural. Di dalam kehidupan sosial yang plural seperti masyarakat Indonesia, masing-masing di antara mereka telah hidup dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu, salah satu syarat bagaimana masing-masing umat yang berbeda-beda agama bisa hidup saling berdampingan dan saling menghormati, adalah dengan memberikan ruang bagi setiap pemeluk agama menjalankan agamanya tanpa adanya perasaan

dikucilkan atau saling mengucilkan. Jika isi dari Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh setiap agama, dan oleh karena itu ia – dalam kesepakatan bersama – ditempatkan sebagai dasar negara – maka tidak perlu lagi dipersoalkan, justru sebaliknya, perlu dipertahankan.

Bagaimana Islam dan umat Islam hidup dalam negara atau pemerintahan yang mendasarkan Pancasila? Dalam konteks seperti ini, Islam dan umat Islam harus tampil dan menampilkan misi Islam itu sendiri yaitu "*rahmatan lil alamin*". Inilah universalitas Islam. Universalitas Islam dalam konteks negara, didasarkan atas tujuh prinsip²⁹. Ketujuh prinsip itu, (1) adalah *al-syura* (*consultation*). Artinya, prinsip musyawarah merupakan suatu prinsip yang diperintahkan al quran dan karena itu menjadi prinsip etika politik;³⁰ (2) prinsip *al musawa* (*equality*) dan *al ikha'* (*brotherhood*). Keduanya mengandung pengertian persamaan dan persaudaraan. Pada prinsip ini, manusia adalah sama yang berbeda atau yang membedakan adalah kualitas ketaqwaannya;³¹ (3) prinsip *al-adallah* (*justice*)

²⁹ Lihat Salam Arif (2004: 1-18).

³⁰ Lihat surat Al Imron: 3: 159; dan al Syura: 42: 38.

³¹ Lihat Al Hujarat: 49: 13.

yang mengandung arti: *honesty*, *fairness*, dan *integrity* yaitu keadilan yang harus ditegakkan tanpa diskriminasi, penuh kejujuran, ketulusan dan integritas³² (4) *al hurriyyah* (*freedom*) yang berarti menganut kebebasan. Kebebasan dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat harus diatur oleh aturan-aturan perundang-undangan agar kebebasan seseorang tidak melanggar kebebasan pihak lain; (5) prinsip *al amanah* (*trust*). Dalam konteks kekuasaan negara, amanah merupakan mandat rakyat yang di dalamnya mempunyai nilai kontrak sosial yang tinggi;³³ (6) prinsip *al salam* (*peace*) atau perdamaian sebagaimana dikemukakan al Quran.³⁴ Dan (7) adalah *al tasamuh* (*toleran*) yaitu prinsip saling menghormati antarsesama warga masyarakat. Prinsip ini berlaku universal, bukan saja terhadap masalah yang bersifat profan, tetapi juga masalah yang bersifat sakral, seperti toleransi dan menghormati agama-agama lain.³⁵

Prinsip *tawasuth* (*toleran*) dan *tasawuth* (*moderat*) juga dipertunjukkan di dalam memaknai dan menempatkan budaya-

³² Lihat surat al Maidah: 5: 8; dan al Anam: 6: 152.

³³ Lihat al Nisa: 4: 58.

³⁴ Lihat al Anfal: 8: 61.

³⁵ Lihat al Baqarah: 2: 256; al Kafirun: 109: 6.

budaya lokal seperti budaya Jawa. Hal ini karena kehadiran agama (Islam) itu sendiri berfungsi untuk menyempurnakan peradaban dan tidak untuk menghilangkan peradaban seperti tradisi-tradisi masyarakat manusia sebagaimana ungkapan Rasulullah: "*Bu'istu li utammima makarimal akhlak*" (aku [nabi] diutus Allah untuk menyempurnakan peradaban). Ini artinya, (a) Islam hadir tidak di dalam ruang (sosial) yang kosong tetapi di dalam ruang sosial yang di dalamnya sudah ada peradaban. Karena itu (b) Islam hadir untuk memilah dan memilih tradisi-tradisi mana yang tidak bersesuaian dengan ajaran Islam yang harus ditinggalkan, dan tradisi-tradisi mana yang diyakini bersesuaian dengan ajaran Islam yang masih perlu dilestarikan. Dengan demikian, "membangkitkan" Islam dalam kehidupan masyarakat, untuk beberapa hal bersifat akulturatif.

Prinsip berfikir substantif dan akulturatif inilah yang memungkinkan kita dengan segala keluhuran jiwa memilih: jika dengan berkata-kata halus masih bisa, mengapa harus dengan kata-kata kasar. Jika dengan berdialog kita bisa menyelesaikan masalah, mengapa harus dengan perang. Jika dengan menghormati orang lain yang berbeda kita masih bisa, mengapa

harus dengan menghinakan. Jika dengan perasaan cinta antarsesama, semuanya bisa berakhir dengan baik, mengapa harus dengan menggunakan perasaan kebencian?

6. Strategi Pengembangan Budaya Damai

Bagaimana mendesain suatu kehidupan yang beragam tidaklah dengan memperlawankan satu dengan yang lain dalam sikap yang berhadap-hadapan, melainkan bagaimana mempertemukan titik-titik kesamaan sebagai identitas kultural, dan bersamaan dengan itu, memelihara dan membiarkan perbedaan-perbedaan spesifikasinya sesuai dengan alam kehidupannya sendiri. “Meskipun kita berbeda tetapi satu” adalah sebuah keniscayaan untuk dapat hidup dalam kemajemukan tanpa gangguan yang berarti.

Fenomena keberagaman yang punya daya konflik fisik dan kultural di bumi Nusantara ini, pernah dengan cerdas dileraikan secara kultural oleh Sultan Agung. Ia melihat ada potensi konflik antara kekuatan Islam yang dipimpin oleh para sufi yang lebih mengutamakan pengembangan Islam dalam akidah, syariah, dan sufisme – yang menjauhkan diri dari kemauan memerebutkan kekuasaan raja-raja Jawa, berhadapan dan dihadapkan dengan

pendukung kebudayaan kejawen yang umumnya mereka amat berminat terhadap kedudukan dan kekuasaan. Melihat kondisi demikian, Sultan Agung melakukan antisipasi kultural dengan menghubungkan dua lingkungan budaya dengan mengganti perhitungan tahun Saka yang semula berdasarkan perjalanan matahari, menjadi tahun Jawa yang berdasarkan perjalanan bulan, dan disesuaikan dengan tahun Hijrah, Mingguan Hijrah yang terdiri dari tujuh hari, diintegrasikan dengan *pasar* Jawa yang terdiri dari lima harian, menjadi Senin Wage, Selasa Kliwon dan seterusnya. Demikian juga nama-nama bulan Jawa disesuaikan dengan nama-nama bulan Hijriyah, menjadi Sura, Mulud, dan seterusnya. Strategi yang dicanangkan Sultan Agung di atas, ternyata menggairahkan para sastrawan Kejawen untuk menekuni pokok-pokok ajaran Islam untuk menyusun karya-karya baru dengan menyadap dan mengolah unsur-unsur ajaran Islam untuk memperkaya pengembangan sastra Jawa³⁶. Dari sini, upaya mempertemukan perbedaan yang berpotensi konflik, diubah menjadi potensi sinergis. Pola penyelesaian masalah secara damai dan berefek kepada lahirnya produktivitas

³⁶ Lihat Simuh. 2000. "Keunikan Interaksi dan Budaya Jawa". Paper.

demikian inilah yang seharusnya menjadi dan dijadikan acuan penyelesaian masalah bangsa ke depan.

APA yang bisa kita petik dari kajian di atas adalah pelajaran mengenai sikap manusia yang sering paradoksal. Pengetahuan dan niat baik saja ternyata tidak cukup. Tidak selalu niat baik menghasilkan tujuan baik, karena dalam perjalanannya manusia tergoda dan terbius kepentingan jangka pendek. Begitu pula, niat damai tak selalu dipahami orang agar dicapai dengan jalan damai pula. Sebagian dari mereka cenderung menggunakan jalan kekerasan. Pertanyaannya, sejauh mana jalan kekerasan bisa mewujudkan kedamaian? Dalam kasus masyarakat manakah jalan kekerasan bisa menghasilkan kedamaian?

Itulah sebabnya, kita menjadi sadar bahwa ketika orang atau suatu kelompok melihat kelompok lain sebagai “lawan” dan oleh karena itu, adalah wajar untuk dimusuhi bahkan dilawan – **ternyata adalah hasil konstruksi manusia sendiri**. Jika demikian halnya, maka tugas kita adalah “membongkar” konstruksi sosial itu, lalu membangun kembali menjadi bangunan di mana setiap manusia merasa nyaman

memasuki bangunan tadi. Untuk itu, kita masih perlu belajar bagaimana menumbuhkan kesanggupan bukan saja untuk melihat dan memperlakukan orang lain sebagai saudara, tetapi juga mendesain bangunan persaudaraan itu sendiri.

Tinggal kita sekarang di sini, apa yang bisa kita sumbangkan untuk membangun kedamaian itu. Yang jelas, perbedaan (*nurture and culture*) adalah desain Sang Creator (Maha Pencipta). Karena itu, perbedaan adalah keindahan, sehingga tugas mulia manusia ialah menghadirkan keindahan kepada setiap hatinurani manusia.

7. Akhir kata

Hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal. **Pertama**, jabatan sebagai guru besar bagi saya bukanlah segalanya, tetapi menjadi awal bagaimana saya belajar menjadi manusia. Jabatan sebagai guru besar menurut saya hanyalah tahapan di mana setiap dosen mempunyai peluang untuk menggapainya. Jabatan itu tidak berarti bahwa sang pemiliknya tahu semua persoalan ilmu yang ditekuni, melainkan justru baru tahu kalau dirinya belum banyak tahu, sehingga diwajibkan untuk mencari tahu bahwa ilmu itu

tidak terbatas, dan saling berkait dengan cabang-cabang ilmu lainnya.

Kedua, saya ingin berpesan kepada mahasiswa bahwa sesungguhnya saya merasa terlambat untuk belajar banyak hal. Karena itu, jangan sia-siakan waktu berjalan tanpa kalian tahu mau kemana tujuannya. Tujuan hidup bukan saja bagaimana menjadi orang baik, tetapi juga bagaimana menghadirkan kebaikan itu di mana pun kita berada. Karena itu, ilmu yang engkau pelajari di bangku sekolah, di perguruan tinggi, dan di mana pun, adalah sekedar alat (*wasilah*) yang memungkinkan kita bisa menjadi baik, tetapi belum menjadi kebaikan itu sendiri. Ia menjadi baik atau sebaliknya, tergantung dari cara dan untuk tujuan apa ilmu itu diterapkan.

Kepada kawan-kawan dosen (terutama yang usianya lebih muda dari saya), ilmu Anda sangat berguna apalagi kalau diamalkan. Untuk itu, amalkanlah ilmu-ilmu kalian ke dalam ranah yang lebih luas. Dunia hari ini adalah dunia menulis. Karena itu, tulisan adalah dokumen yang berumur panjang. Dan *insyaallah*, dokumen tulisan itu akan menjadi amal *jariyah* meskipun mungkin kita sendiri sudah tiada.

Dengan pengukuhan ini, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada Mendiknas, Rektor/ Ketua Senat Undip, seluruh anggota Dewan Guru Besar dan Senat Universitas, Dekan Fakultas Sastra, seluruh anggota Senat Fakultas Sastra, Ketua Jurusan Jurusan Sastra Indonesia – atas dukungan dan persetujuan pengangkatan guru besar kepada saya. Ucapan terimakasih yang sama, juga saya sampaikan kepada para anggota per-group dan penyelia naskah pidato pengukuhan ini.

• Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan baik ini, izinkan juga saya mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak, yang hadir di sini maupun yang tidak hadir di sini. Yang masih *sugeng* maupun yang sudah mendahului. Kedua orang tuaku. Ayah almarhum Kiai Haji Thohir, *Panjenengan* sepertinya memilihkan aku menjadi yatim di usia tiga tahun agar belajar kehidupan. Ibuku, almarhumah Hajjah Qomariyah. Aku belajar banyak tentang kehidupan ini justru dari bagaimana *Panjenengan* memaknai dan menjalani hidup ini. Bagaimana mencintai orang lain melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Para guru madrasah dan guru ngaji alquran, yang tidak pernah mengeluh meskipun tidak ada yang membayar setimpal atas jasa yang diberikan.

Para guru di SD Negeri Kutoharjo, para Guru SMP Negeri Kaliwungu, dan para guru di SPIAIN Semarang, jabatan guru besar yang hari ini disandangkan kepada saya, adalah hasil untaian pintalan benang-benang keilmuanmu. Semoga bagi yang sudah *sumare*, Allah mengihlaskan mereka untuk menempati surga yang telah tersediakan. Bagi yang masih *sugeng*, semoga diberkahi hidup dengan kedamaian. Para dosen-dosen saya di Fakultas Sastra, Jurusan Sastra Indonesia, Universitas Diponegoro. Dengan rasa tulus saya mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu yang telah diberikan. Kepada almarhum Profesor Slamet Rahardjo MA, saya merasa bukan saja hutang budi, tetapi juga menjadi tergugah untuk belajar dengan baik justru karena saya terpukau dengan cara *Panjenengan* mengajar. Semoga *Panjenengan* dicatat sebagai orang yang sangat baik, dan karenanya tidak ada tempat yang lebih layak kecuali syurga. Profesor Soedjarwo, saya sangat menghargai kesederhanaan dan ketulusan *Panjenengan*.

Para dosen yang mengajar saya di S2 dan S3 Antropologi UI, saya mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu yang diberikan. Almarhum Profesor Koentjaraningrat, saya

sangat mengagumi apa yang Panjenengan lakukan sebagai ilmuwan: mengembangkan ilmu Antropologi di Indonesia dan menulis berbagai buku bermutu. Almarhum Profesor Parsudi Suparlan, strategi mengajar dan dalam melakukan bimbingan, terus terang, memacu saya untuk mencintai ilmu.

Di Undip, saya belajar banyak dari cara bagaimana almarhum Profesor Satoto mengatur waktu dan menentukan pilihan-pilihan intelektualnya. Untuk itu, izinkan saya mengucapkan terimakasih yang tulus. Semoga engkau "di sana", memperoleh hadiah nan indah dari Tuhan atas amaliah yang engkau sebar-luaskan. Profesor Eko Budihardjo, saya mengagumi familiaritas yang engkau tanamkan. Mas Darmanto Jatman, Engkau ikon untuk Universitas Diponegoro. Atas prestasi yang diwujudkan itulah, maka adalah sudah semestinya kalau Engkau diberi hak untuk menyandang guru besar. Semoga Engkau cepat sembuh. Tuhan mengasihanimu, sebagaimana engkau telah terbiasa mengasihani semua orang yang engkau kenal.

Kawan-kawan di Fakultas Sastra, seperti Suhariyanto, Suryadi, Tutik, dan Mirya Anggrahini, Muzaka, dllnya, terimakasih atas segala dorongannya. Para staf administrasi Fakultas Sastra,

khususnya Sunarno, Asroni, dan Sujono, terimakasih atas layanan dan perhatian kalian.

Kawan-kawan Penerbit Fasindo, seperti Mulya Hadi Purnomo, Redyanto Noor, Surono, dan Rukiyah. Mari kita besarkan penerbitan kita.

Kawan-kawan komunitas Lengkong Cilik khususnya Agus Maladi Irianto, Somad, dan Ony. terimakasih atas kerjasamanya.

Kawan-kawan di Puslit Sosbud Undip, Endang Susilowati, Ronny Aruben, Mahendra, dan Profesor Juliati Suroyo. Mari kita jaga komitmen intelektualitas.

Kawan-kawan peneliti, seperti Profesor Indah Susilowati, Waridin, Agung, Tri Agustini, dan kawan-kawan yang tekun di Lemlit Undip, mari kita besarkan Undip dengan melakukan penelitian-penelitian yang bermutu.

Kawan-kawan dari IAIN, seperti Profesor Abdul Jamil, Muhsin Jamil, Abu Hafsin, Abdul Hakim, dan Najahan.

Kawan-kawan di Unnes, seperti Profesor Cecep, dan Nugroho.

Kawan-kawan di komunitas Nahdliyyin, seperti Kiai Masruri Mughni, Gus Ubeidillah Sadaqoh, Muhammad Adnan, Aufarul Marom, Agus Fathuddin, Abdillah, dan Suryanto.

Kawan-kawan wartawan, seniman, dan budayawan di Jawa Tengah.

Kawan-kawan di takmir masjid Kaliwungu, seperti Kiai Khafizin, Kiai Abdul Basith Ibrahim, dan Ali Ridlo.

Kawan-kawan yang menaruh simpati atas pengukuhan ini, seperti Mastur Sholeh, Itos Budisantoso, dan Saifullah Muzaki.

Kawan-kawan seperjuangan di Lakspesdam Jawa Tengah, seperti Sumanto al Qurtubi. Najihah dan Faizah.

Kawan-kawan panitia pengukuhan ini. Saya tidak bisa membalas jasa kalian, kecuali mengucapkan terimakasih yang tulus.

Saudaraku Haji Hisyam, Haji Mukhdlor, Haji Jauhar, dan Haji Asro'ie Thohir. Terimakasih atas kasih sayangnya selama ini.

Isteriku, Sri Wasiyati, terimakasih sekali atas semua persembahanmu.

Kedua anakku, Mizar Yuniar dan Mizwar Agustifar, aku ingin mempersembahkan karya ini untuk kamu berdua. Semoga engkau memaklumi ayahmu atas segala perhatian yang kurang. Semoga engkau berdua, bisa terbang lebih tinggi daripada kami. Ridloku, ridlo Allah jua. Maka mintalah perlindungan kepada-Nya.

WASSALAMUALAIKUM WR WB.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik

- 1974 "Cita dan Corak Reformasi Islam di Indonesia – Sebuah Tafsiran", kertas kerja disampaikan pada seminar: "Agama dan Perubahan Sosial", di IAIN Syarif Hidayatullah, Desember 2-6 1974.

Abubakar, Irfan

- 2007 "Paradigma Peace-building Pasca Konflik Kekerasan" dalam *Nusantara*.
gigihnusantaraid@yahoo.com Sun Dec 1. 10:24:07 2002.

Ahmed, Nafeez Mosaddeq

- 2007 *The London Bombings – an Independent Inquiry*.
Malaysia: Thinker's Library SDN.

Buchori, Moctar

- 1986 "Radikalisme Agama – Sebuah Catatan Awal", dalam
Pesantren, No. 4/Vol.III. Hlm. 55-69.

Burrell, RM, ed.

- 1995 *Fundamentalisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Offset. (Terjemahan)

Chossudovsky, Michel

- 2007 *America's "War on Terrorism"*. Malaysia: Thinker's
Library SDN.

Combs, James dan Manfield, Michael W (eds)
1976 *Drama in Life*. New York: Hating House Publisher.

Effendi, Bahtiar

1998 *Islam dan Negara – Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.

2001 *Teologi Baru Politik Islam – Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Galang Press.

Effendy, Bahtiar dan Sirry, Mun'in A

2003 “Ekstremisme Islam: Bukan Sekadar Persoalan Teologis atau Penafsiran Keagamaan”, dalam *Jurnal Demokrasi & Ham*. Vol. 3, No. 1, Januari – April. Hlm 105-121.

Fananie, Zainuddin dkk

2002 *Radikalisme Keagamaan & Perubahan Sosial*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Fealy, Greg dan Barton, Greg (eds)

1996 *Tradisionalisme Radikal – Persinggungan Nahdlatul Ulama – Negara*. Yogyakarta: LkiS.

Front Pembela Islam (FPI)

<http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=877>

<http://id.wikipedia.org/wiki/>

Daftar aksi Front Pembela Islam

<http://www.lampungpost.com/actual/berita.php?id=1715>

<http://fpi-online.blogspot.com/>

<http://www.opensubcriber.com/>

Gazali, Hatim

- 2003 "Agama dalam Cetakan Baru", dalam <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=454>.

Harahap, Mula

- 2007 "Tentang Konflik", dalam <http://mulaharahap.wordpress.com/2007/04/18/tentang-konflik/>

Hall, John R

- 2001 "Religion and Violence: Social Processes in Comparative Perspective", dalam [, jrhall@ucdavis.edu](mailto:jrhall@ucdavis.edu).

Hassan, Sahar L dkk. (eds)

- 1998 *Memilih Partai Islam*. Jakarta: Gema Insani.

Hasyim, Syafiq

- 2002 "Fundamentalisme Islam: Perebutan dan Pergeseran Makna", dalam *Afkar*. Edisi No. 13, hlm. 5- 18.

Hefner, Robert W

- 2002 "Tragedi 11 September dan Perjuangan Muslim Demokrat", dalam *Afkar*, Edisi No. 13. Hlm. 104-110.

Hidayat, Komarudin

- 2006 "Tuhan, Agama, dan Negara", *Kompas*. 27 Oktober. Hlm: 6

Jainuri, Achmad

- 2002 *Ideologi Kaum Reformis*. Surabaya: LPAM (Terjemahan).

Jamhari

2003 "Radikalisme Islam di Indonesia: Fenomena Sesaat?", dalam *Jurnal Demokrasi & Ham*. Vol. 3, No. 1, Januari – April. Hlm: 78-104.

Kasdi, Abdurrahman

2002 "Fundamentalisme Islam Timur Tengah: Akar Teologi, Kritik Wacana dan Politisasi Agama", dalam *Afkar*, Edisi No. 13, hlm. 19-35.

Kipp, Rita Smith dan Rodges, Susan. eds.

1987 • *Indonesian Religions in Transition*. USA: The University of Arizona Press.

Makassary, Ridwan al

2007 "Peace Building untuk Masyarakat Indonesia Pasca Konflik: Suatu Kerangka Konseptual untuk Aksi". Paper.

Paassen, Y.v

1978 "Kerjasama Antar Agama dan Prospeknya: Kasus Sulawesi Utara", dalam *Prisma* 5, Juni . Hlm. 18-27.

Paige, Glenn D, dkk (eds)

1998 *Islam Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: LkiS.

Panggalo, Indu Yohanis

1999 "Islam Din Wa Daulah", dalam *Agama dalam Dialog – Pencerahan, Pendamaian dan Masa Depan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Priyono, AE

2003 "Fenomena 'Terorisme Agama' dan Kebangkitan Neo-Fundalisme Islam di Indonesia Pasca Orde Baru", dalam *Jurnal Demokrasi & Ham*. Vol. 3, No. 1, Januari – April. Hlm: 6 -34.

Rahman, M Fadjoel

2007 "Akhir Drama Gertak Sambal", *Kompas*, Rabu, 30 Mei 2007: 6.

Rahman, Fazlur

2000 *Gelombang Perubahan dalam Islam – Studi tentang Fundamentalisme Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rakhmat, Jalaluddin

1984 "Fundamentalisme Islam: Mitos dan Realitas", dalam *Prisma Ekstra*. Hlm: 78-88.

Ridwan, Nur Khalik

2002 "'Agama Borjuis' Islam Fundamental: Berdasarkan Kasus Surakarta", dalam *Afkar*, Edisi 13, Hlm. 93-103.

Rizq, Jaber

2003 *Kisah Duka Ikhwanul Muslimin – Sebuah Nostalgia Perjuangan Dakwah*. Yogyakarta: Fahima (Terjemahan).

Robertson, Roland, ed.

1988 *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*. (Terjemahan Saifuddin, Akhmad Fedyani). Jakarta: Radjawali Press.

Roy, Oliver

2002 "Neo-Fundamentalisme", dalam *Afkar*, Edisi 13. Hlm. 111- 116.

Rumadi

2002 "Jihad: Mengapa Jadi 'Hantu' Islam?, dalam *Afkar*, edisi 13. Hlm. 60-73.

Siddiq, Ahmad

1980 *Khittah Nahdliyah*. Surabaya: Balai Buku.

1985 "Dari Kitab Kuning sampai Kontak Masyarakat". Dalam *Pesantren*. Vol.II. No. 4,. Jakarta: P3M. Hlm. 51-54.

Salam, El Fatih A. Abdel

2007 "Kerangka Teoritis Penyelesaian Konflik" dalam http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmddd/artikel_ef.htm

Sammak, Mohammad

2006 "Perang dan Damai" dalam www.dailystar.com.lb

Simuh

2000 "Keunikan Interaksi Islam dan Budaya Jawa". Paper Seminar "Pengaruh Islam terhadap Budaya Jawa", Yogyakarta. 31 November.

Suady, Ahmad (ed)

2000 *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*. Jakarta: Grasindo-P3M.

Suparlan, Parsudi

1999 "Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya",
dalam *Antropologi Indonesia*. Tahun.
XXIII, No. 59, Mei – Agustus. Hlm. 7 -19.

2002 "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural",
paper untuk Simposium Internasional, di Bali (16-
21 Juli 2002). [http://www.scripps.ohiou.edu/news/
cmdd/artikel_ps.htm](http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel_ps.htm)

Susetyo Pr, Benny

2003 "Membangun Perdamaian", dalam
gigihnusantaraid@yahoo.com

Suyanto, S

2007 "Paradigma Peace-building di Indonesia Pasca
Konflik Kekerasan", dalam [http://www.csrc.or.id/
artikel/?Berita=07200351717&KATEGORI=28](http://www.csrc.or.id/artikel/?Berita=07200351717&KATEGORI=28).

Thohir, Mudjahirin

1998 *Konflik Sosial Masyarakat Kodya Pekalongan Jawa
Tengah*. Semarang: Limpad & Usaid. (Laporan
Penelitian)

1999 "Kemajemukan, Konflik Sosial, dan Resolusi Konflik
di beberapa Kota di Indonesia". Paper Seminar Hasil
Penelitian Menyibak Konflik di Indonesia, di
Semarang, 13-14 Oktober 1999.

2001 "Kaum Santri dan Nasionalis: Konflik dan
Kompromi". Paper untuk Diskusi Disertasi.

Semarang: DRD.

- 2003 "Agama, Politik, dan Nilai-nilai Kemanusiaan". Paper untuk Bedah Jurnal Tashwirul Afkar, edisi 15, tahun 2003, di Unwahas Semarang.
- 2004 "Radikalisme Religio Politik di Jawa Tengah". Hasil Penelitian.
- 2004 "Masalah Hubungan Antarsuku Bangsa di Indonesia – Bagaimana Mengimplementasikan Asimilasi untuk Kesetaraan dan Kebersamaan". Paper untuk Temu Karya Asimilasi Prop. Jawa tengah, 30 November 2004.
- 2004 "Agama dan Pengabdian Keagamaan". Paper untuk Semiloka DPD Ayub Jawa Tengah, 27 Agustus 2004.
- 2004 "Harmoni dalam Konflik". Paper untuk Diskusi "Politik Hati Nurani" oleh Forum Hati Nurani, Semarang: 28 Mei 2004 di Semarang.
- 2004 "Agama dan Pembangunan". Materi Kuliah S3 Sosiologi Pembangunan, Fak. Ekonomi Undip, 25 Maret 2004.
- 2005 *Kekerasan Sosial Masyarakat Jawa Pesisir Utara*. Semarang: Lengkong Cilik.
- 2006 *Orang Islam Jawa Pesisiran*. Semarang: Fasindo.

2006 “Agama dan Kekerasan Sosial di Indonesia”, dalam *Sabda*. Vol. 1, No. 2, Desember, hlm. 50 – 64.

2007 *Memahami Kebudayaan – Teori, Metodologi, dan Aplikasi*. Semarang: Fasindo.

Thoyfoer, Achmad

2007 *Politik Santri – Santri Berpolitik*. Semarang: Sekoci Media.

Wahid, Marzuki dan Nurrohman

2002 “Dimensi Fundamentalisme dalam Politik Formalisasi Syariat Islam”, dalam *Afkar*, Edisi 13, Hlm. 3459.

Zada, Khamami

2003 “Politik Islam Radikal – Survei Wacana dan Gerakan Islam di Indonesia”, dalam *Jurnal Demokrasi & Ham*. Vol. 3, No. 1, Januari – April. Hlm 35- 54.

Zarkasyi, Hamid Fahmy

2008 “Membangun Peradaban Islam yang Bermartabat”, dalam <http://banihamzah.wordpress.com/2007/05/07/teori-pengaruh-terhadap-islam/>

Zufriendi

“Islam Keras”. <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=966>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. N a m a : Prof. Dr. Mudjahirin Thohir, M.A.
2. Tempat, tanggal lahir : Kendal, 12 Maret 1954
3. Isteri : Sri Wasiyati, BA
4. Anak : - Mizar Yuniar, SPsy
- Mizwar Agustifar
5. Pangkat / Golongan : Guru besar/ IV-B
6. Alamat Kantor : - Fakultas Sastra,
Jl. Hayamwuruk no. 4
Semarang;
- Puslit Sosbud Lemlit Undip,
Widya Puraya Lt. 2,
Kampus Tembalang.
7. Alamat rumah : Plumbungan No.4 Kaliwungu,
Kendal
Telp./Fax. (0294) 381753
HP. 08122935474
8. Email : thohir_mudjahirin@yahoo.com
9. Bidang keahlian : Antropologi/Filologi

10. Pendidikan:

- a. **Sarjana Sastra** (Drs) pada Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, tahun 1980.
- b. **Magister Antropologi** (MA) pada Program Studi Antropologi Pascasarjana Universitas Indonesia, tahun 1991.
- c. **Doktor** (Dr) pada Program Studi Antropologi Pascasarjana Universitas Indonesia dengan Disertasi "Kehidupan Keagamaan Orang Jawa Pesisir: Studi Orang Islam Bangsri Jepara", tahun 2002.

11. Pekerjaan:

- Staf Pengajar Fakultas Sastra, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Staf Pengajar Program Magister (S2) Arsitektur Universitas Diponegoro.
- Staf Pengajar Program Magister (S2) Manajemen Pantai Universitas Diponegoro.
- Staf Pengajar Program Magister Susastra (S2) Fak. Sastra Universitas Diponegoro

- Staf Pengajar Program Magister Ilmu Politik (S2) Fisipol Universitas Diponegoro
- Staf Pengajar Program Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Kepala Pusat Penelitian Sosial Budaya, Lemlit Universitas Diponegoro.

12. Training yang Diikuti

PLPIIS (Peserta Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial) selama satu tahun (Agustus 1983 sampai September 1984) di Universitas Hasanudin, Makassar.

13. Kegiatan Keilmuan:

A. Penelitian yang pernah dilakukan, di antaranya:

No	Judul	Tahun
1.	Upacara Lingkaran Hidup dan Upacara Komunal di Kalangan Masyarakat Pesisir Utara Jawa – Kasus Desa Kranjan Kulon, Kallwungu, Kendal	1992
2.	Inventarisasi Karya-Karya Sastra Pesantren dan Usaha Pelestariannya	1992
3.	Agama dan Etos Kerja: Studi tentang Etos Kerja Pengrajin Ukir Jepara di Kalangan Kejawan dan Santri	1993
4.	Hubungan Ritus dalam Aktivitas Ekonomi – Kasus Masyarakat Pengrajin Ukir Jepara	1994
5.	Insan Kamil: Kajian Kepustakaan tentang Mistisisme Islam	1994
6.	Makna Miskin bagi Keluarga Miskin – Kasus Buruh Ukir Jepara	1994
7.	Anemia di Kalangan ibu-ibu Hamil di Maluku (Pendekatan Sosial Budaya)	1995
8.	Makna Waktu Sibuk dan Waktu Luang bagi Masyarakat Lapis Bawah Perkotaan: Kasus Masyarakat Bandarharjo, Semarang	1996
9.	Konflik Sosial di Pekalongan	1999
10.	SRI SEDONO – Kajian Etnografi Masyarakat Pengrajin Ukir Jepara di Jawa Tengah.	2001
11.	Kehidupan Keagamaan Orang Jawa Pesisir	2002
12.	Studi Kebijakan Sosial, Politik dan Budaya Tentang Resistensi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah	2003
13.	Penelitian Komunitas Dukuh Gebang Sewu, Desa Banteng Mati Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak	2003
14.	Penyusunan Rencana Kampanye Lingkungan Hidup di Kabupaten Wonosobo	2003
15.	Studi Dampak Pembangunan PLTN di Semenanjung Muria Terhadap Sektor Ekonomi Daerah	2004
16.	Sosialisasi Rencana Pembangunan PLTN di Jepara, Kudus dan Semarang	2004
17.	Komunitas Adat Terpencil di Desa Ujung Gagak, Desa Ujung Alang dan Desa Panikel Kecamatan	2004

B. Penulisan Paper untuk Seminar dan Majalah Ilmiah, di antaranya:

No	Judul	Tahun
1.	Peranan Wong Pinter di Kalangan Masyarakat Pengrajin Ukir di Desa Sukodono Jepara Jawa Tengah. Disampaikan di Cipanas Jawa Barat, Kerjasama dengan YIIS dan The Toyota Foundation	1992
2.	Agama dan Etos Kerja. Disampaikan di Undip Semarang	1993
3.	Mistisisme Islam. Disampaikan di Undip Semarang	1994
	"Selamatan Rasulan: Simbol dan Pemaknaannya". Dalam <i>Lembaran Sastra</i> . No. 18/1995. (Hlm. 114-120)	1995
4.	Konflik Sosial di Pekalongan. Disampaikan dalam Seminar Internasional di Semarang	1999
5.	Kemajemukan, Konflik Sosial, dan Resolusi Konflik di Beberapa Kota di Indonesia – Temuan Penelitian Kualitatif. (Kerjasama Limpad dengan USAID)	1999
6	"Perempuan dan Eksploitasi Seksual". Seminar Lemlit Undip 4 Nov 1999.	1999
7	"Miras dalam Tinjauan Sosio-Kultural". Seminar di Jepara. 12-11-2000.	2000
8	"Informasi Global dan Dunia Pesantren". Sarasehan Pemberdayaan Pesantren Jateng, 21 -26 Februari 2000.	2000
9	Penelitian Kualitatif ASIA. Disampaikan di Lemlit Undip Semarang	2001
10	Psikologi Komunitas Nahdliyyin dan Nahdliyat. Disampaikan dalam Diskusi di Kendal. 26 Maret 2001.	2001
11	Pemberdayaan Perempuan di Sekitar Hutan. Disampaikan pada Pelatihan Pemberdayaan Perempuan, di Magelang Kaliwungu Kendal, 2-12-2001	2001
12	Fenomena Masyarakat Jepara dalam Konteks Politik	2001
13	"Masyarakat Pesisir Dilihat dalam Perspektif Sosial Budaya". Disampaikan dalam Seminar Nasional Pemberdayaan Masy. Pesisir, di Semarang.	2001

14	"NU dan Muhammadiyah: Persaingan Berkhidmat, Persaingan Berkepentingan." seminar IAIN Walisongo Semarang	2001
15	Metodologi Penelitian Kualitatif	2002
16	"Tradisi Ruwatan dalam Prespektif Agama". Sarasehan di Kendal. 10 Juli 2002.	2002
17	Islam di luar dan di dalam Kebudayaan Jawa. Seminar Dewan Kesenian Jawa Tengah, 4-9-2002	2002
18	Dinamika Politik, Partai Politik, atau Gejolak Politik?	2002
19	"Wisata Agama: Ziarah". Seminar di Demak, 2 Oktober 2002.	2002
20	Seni Lengger dalam Kebudayaan Petani Jawa. Disampaikan dalam Forum Diskusi Lengkong Cilik Semarang	2002
21	Nelayan, Lautmu Terbentang Luas	2002
22	"Gender dalam Perspektif Antropologis". Diskusi di Fak. Sastra Undip, 4 November 2002.	2002
23	Paradigma Penelitian Ilmiah. Disampaikan pada Lokakarya Metodologi Penelitian di Fakultas Sastra Undip, 28-2-2002	2002
24	"Kaum Santri dan Nasionalis: Konflik dan Kompromi". Seminar di DRD Jawa Tengah.	2002
25	"Budaya Demokrasi dalam Perspektif NU". Seminar Demokrasi Adi Luhung, 11 Agustus 2002, di PHI Semarang.	2002
26	"Ormas Islam dan Orsospol: Bagaimana Membangun Kehidupan yang Lebih Baik?". disampaikan dalam Silaturahmi Tokoh-tokoh Islam se Jawa Tengah.	2003
27	Sehat dan Sakit dalam Pandnangan Tradisional Masyarakat Jawa	2003 (?)
28	"Respond Masyarakat terhadap Proyek PLTN di Jepara Jawa Tengah" disampaikan dalam KATN, di Bandung.	2003
29	<i>Peran Intelektual NU terhadap Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara</i>	2003

30	"Agama, Politik, dan Nilai-nilai Kemanusiaan" disampaikan di Unwahas Semarang.	2003
31	"Penyalahgunaan Narkoba Dilihat dari Perspektif Sosial Budaya". Seminar Pemkab Tegal. 24 Desember 2003.	2003
32	"Agama dan Pengabdian Keagamaan" disampaikan pada Semiloka DPD Ayub Jateng	2004
33	Agama dan Pembangunan	2004
34	"Peningkatan Kualitas (Pendidikan) Manusia Berdasarkan Pendekatan Sosial Budaya" disampaikan di Unes Semarang	2004
35	"Masalah Hubungan antar Suku Bangsa di Indonesia". Disampaikan dalam acara Temu Karya Asimilasi Prop. Jateng.	2004
36	.Harmoni dalam Konflik	2004
37	Sosial Budaya PLTN di Jepara. Seminar Sosialisasi PLTN di Hotel Pandanaran, 21 Juli 2004.	2004
38	Gerakan Politik Orang Santri Bangsri Jepara pada Era Orde Baru	2004
39	"Pendidikan dalam Perspektif Budaya Pesisir". Disampaikan di Univ. Pancasila Tegal, Jawa Tengah	2005
40	"Pasang Surut Gerakan Politik Kaum Santri: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi – Kasus Jepara Jawa Tengah". Disampaikan dalam Diskusi LSM Percik Salatiga. 8-9 Juli 2005.	2005
41	"Fundamentalisme Keagamaan dalam Perspektif Kebudayaan". Makalah disampaikan pada seminar di Unnes Semarang.	2006
42	Masyarakat Indonesia dan RUU Kebahasaan. Makalah disampaikan pada Seminar Kebahasaan dalam Rangka Bulan Bahasa oleh Balai Bahasa Semarang	2006
43	<i>"Seni Berkomunikasi dan Mengkomunikasikan Pembangunan PLTN dalam Konteks Community Development". Disampaikan pada Seminar Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap PLTN sebagai Pembangkit Listrik bagi Masyarakat, di Semarang.</i>	2006

44	Agama dan Masyarakat Nelayan. Disampaikan dalam Seminar Desain Operasional Penelitian. Litbang Depag Jateng & DIJ.	2007
45	<i>Social Awareness, Acceptability, & Responsibility in its Relation with the PLTN Programm.</i> Disampaikan dalam Seminar Internasional: Seminar and Exhibition on Nuclear Energy for Peace and Prosperity. Di Jakarta.	2007
46	Pendidikan dan Kekuasaan. Disampaikan pada seminar Pendidikan di FIP Unnes	2007
47	Eksistensi Budaya Pesisiran pada Era Globalisasi. Disampaikan pada seminar "Dialog Budaya", Mei 2007	2007

C. Penulisan Karangan Buku

No.	Judul	Tahun
1.	Mujahirin Thohir. "Kebudayaan Masyarakat Perantau", dimuat pada Mukhlis dan Robinson, Kathryn (eds). Migrasi hal, 67-133	Diterbitkan oleh Yayasan Ilmu-ilm Sosial. Tahun 1985
2.	Mudjahirin Thohir. " <i>Wacana Masyarakat dan Kebudayaan Jawa Pesisiran</i> "	Diterbitkan oleh Penerbit Bendera Semarang, 2000
3.	Mudjahirin Thohir dan Agus Maladi Irianto, " <i>Membangun Rasa Damai di atas Bara</i> "	Diterbitkan oleh Limpad Semarang 2000
4.	Mudjahirin Thohir. <i>Seni Lengger dalam Kebudayaan Petani Jawa</i>	Diterbitkan untuk kalangan terbatas oleh Lengkon Cilik Semarang, 2002
5.	Mudjahirin Thohir. " <i>Talbiyah di atas Ka'bah</i> "	Diterbitkan oleh Logung Pustaka Yogyakarta, 2004
6	Mudjahirin Thohir, <i>Kekerasan Sosial Masyarakat Pesisir Utara.</i>	Diterbitkan oleh Lengkon Cilik & Puslit Sosbud, 2005.
7	Mudjahirin Thohir, <i>Orang Islam Jawa Pesisir Utara.</i>	Diterbitkan oleh Fasindo. 2006.
8	Mudjahirin Thohir. <i>Memahami Kebudayaan: Teori, Metodologi, dan Aplikasi.</i>	Diterbitkan oleh Fasindo 2007